

- .....,2001. "Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Berwibawa". *Makalah*, Jakarta.
- .....,2002. "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Serial Otonomi Daerah, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Munir Dasril, Djuanda, Tangkilisan., 2004. "*Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*". Penerbit YPAPI, Yogyakarta.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

---

- .....,2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah". Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta.
- .....,2005. "Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah". Ditjen BAKD Depdagri, Jakarta.
- .....,2006. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.
- .....,2007. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Jakarta.
- .....,2011. Evaluasi Kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013. Kerjasama BP2EB Fak. Ekonomi Unram dengan Bappeda Provinsi Nusa tenggara Barat.
- Halim, Abdul.,2002. "Akuntansi Keuangan Daerah". Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- ....., 2004. "Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hariyadi, Jasagung, 1999, "Evaluasi Sisa Perhitungan Anggaran Pada Perhitungan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 1991/1992 – 2000", Tesis S-2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Hasbullah Yusuf, 2007, Anaisis Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2002-2005). Penerbit : Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.2 April 2007.
- ....., 2007, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Mataram. Penerbit : Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.3 Juli 2007.
- Hasbullah Yusuf., M. Irwan., Taifiq Chaidir, Ida Ayu Putri Suprapti, 2011. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2009-2013) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Hasbullah Yusuf., M. Irwan., Taifiq Chaidir, Ida Ayu Putri Suprapti, 2011. Rencana Aksi Daerah-Percepatan Program Pembangunan Ekonomi Indonesia (RAD-MP3EI) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Kama, 2002. "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perencanaan APBD Tahun 2001 Bidang Pembangunan SDM di Lombok Tengah". Tesis S2, Program Pascasarja Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (tidak dipublikasikan).
- Luo, Huaping and Robert T Golembiewski., 1996. "Budget Deficits in China Calculations, Causes, and Impacts". The Pennsylvania State University, JXR11 @ PSU.EDU.
- Mardiasmo, MBA, Ak., 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Makalah Seminar HIMMEP, Yogyakarta.

otonomi khusus, selebihnya adalah berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang syah.

4. Alokasi belanja berdasarkan SKPD terbagi atas 5 kelompok untuk mendukung program 3A dengan alokasi belanja SKPD yang mendukung program 3A sebesar Rp. 153.681.104.061,00, program Agribisnis PIJAR sebesar Rp. 67.603.118.400,00, rumpun hijau sebesar Rp.17.306.316.400,00, ekonomi berbasis sumberdaya lokal sebesar Rp. 16.015.896.400,00 dan infrastruktur sebesar Rp. 419.783.035.400,00.
5. Kebijakan sistem alokasi anggaran daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB selama ini menggunakan sistem proporsional dan telah dituangkan dalam anggaran belanja yang didasarkan atas urusan pemerintah daerah yang tertuang dalam rencana anggaran masing-masing SKPD untuk pencapaian target NTB Bersaing dan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2009-2013).

#### B. SARAN-SARAN

1. Penetapan target dalam RPJMD hendaknya didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif agar rasional dan target dapat tercapai secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena hasil evaluasi target RPJMD tahun 2011 masih terdapat 16 (enam belas) indikator yang capaiannya masih cukup jauh dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2009-2013.
2. Agar target yang belum tercapai itu bisa terealisir sampai akhir tahun 2013, maka setiap SKPD terkait harus melakukan penajaman program prioritas terhadap indikator yang masih jauh dari target RPJMD Tahun 2009-2013.
3. Peningkatkan kualitas pelayanan, menambah sarana mobilitas

untuk Samsat Keliling, penambahan fasilitas Drive Thru, intensifikasi dan efektifitas OPGAB, pemberian insentif (Pembebasan Biaya BBNKB khusus kendaraan luar daerah), dan pembangunan Gedung Samsat di Kabupaten Sumbawa dan Loteng

2. Mengoptimalkan mekanisme pemungutan pajak dengan sistem On Line, meningkatkan jumlah dana perimbangan, meningkatkan jumlah lain-lain pendapatan yang sah.
3. Formulasi alokasi dan distribusi dana anggaran untuk kabupaten/kota dapat juga menggunakan pendekatan celah fiskal (fiscal gap) yaitu dengan cara mengurangi antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah sedangkan Alokasi Daerah (AD) berupa gaji PNS daerah.

3. Mengalokasikan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada komponen Belanja Tidak Langsung sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
4. Merubah pola pemberian hibah beraswa miskin dari pola bantuan keuangan kepada pola bantuan perlengkapan sekolah, buku-buku pelajaran dan alat tulis.
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Mengalokasikan anggaran untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antar sektor, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan daya dukung kapasitas energi listrik, menurunkan angka buta aksara dan putus sekolah, menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, optimalisasi upaya penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik yang didalamnya termasuk juga persiapan tahapan PEMILUKADA 2013 serta meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama, meminimalisasi konflik sosial dan memperkuat ketahanan budaya daerah.
7. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan, Islamic Center, pengentasan buta aksara, anak putus sekolah dan menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi, menyelesaikan pembangunan rumah sakit umum dan rujukan, melanjutkan Program PIJAR, pengembangan wirausaha baru, pengelolaan ketenagakerjaan, melanjutkan Program Visit Lombok Sumbawa 2012 dan lain sebagainya.
8. Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Pemberdayaan menyangkut penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha

ekonomi produktif, maupun penyediaan infrastruktur strategis. Pola tersebut diatas berpengaruh terhadap kebijakan pola pendistribusian Belanja yang bermuara kepada belanja masing-masing SKPD.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. KESIMPULAN

1. Secara umum kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi NTB, telah dilaksanakan melalui kerangka Strategis program unggulan dan sasaran yang terdiri dari 5 misi, 8 tujuan dan 33 sasaran pembangunan sebagai *ultimate goal* sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2013. Dari indikator ekonomi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2009-2013, nampak berdasarkan hasil analisis, indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat (Purchasing power parity) dan tingkat inflasi masih cukup optimis dapat dicapai sesuai target RPJMD sampai akhir tahun 2013, tetapi tidak demikian dengan IPM.
2. APBD Provinsi NTB sekitar duapertiga dari total pengeluaran Pemerintah Daerah dibiayai oleh bantuan dan sumbangan dari Pemerintah Pusat, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat belum optimal.
3. Penerimaan dari sektor Pajak Daerah dalam kurun waktu 2008-2010 masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yaitu rata-rata sebesar 74,73 % sedangkan kontribusi dari PAD itu sendiri terhadap total Pendapatan Daerah adalah sebesar 41,44%. Selebihnya sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dana perimbangan baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Penyesuaian dan

## 1. Pendapatan Asli Daerah

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah pada tahun 2012 adalah sbb :

- Menggali dan mengembangkan sumber pajak PKB, BBNKB dan PBBKB dengan beroperasinya Bandar Internasional Lombok (BIL).
- Memvalidasi data obyek pajak untuk menyusun perkiraan potensi pajak yang lebih tepat.
- Penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang lebih cepat dan mudah.
- Peningkatan penagihan piutang pajak dan retrebusi daerah yang belum terselesaikan
- Meningkatkan kemampuan personil serta perangkat kerja pemungut pajak
- Peningkatan sarana mobilitas untuk Samsat Keliling dan Pembangunan Drive Thru dalam mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak/masyarakat.
- Pembangunan kantor Samsat di Kabupaten sumbawa dan Kabupaten lombok tengah
- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengelola pajak dan retrebusi daerah
- Melakukan evaluasi terhadap aset daerah yang dikerjasamakan untuk dapat diperhitungkan sebagai potensi sumber pendapatan daerah
- Mengoptimalkan pendapatan dari penyertaan modal yang dilakukan pada PT, BPR, PT. Bank NTB, PT, GNE dan PT Daerah Maju Bersaing.

## 2. Dana Perimbangan

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dana perimbangan adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota untuk meningkatkan dan memperluas Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dari kondisi yang ada saat sekarang ini

- Meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber potensial seperti divestasi saham PT. NNT dan Cukai tembakau.

## 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lain-lain pendapatan yang syah melalui :

- Mengupayakan informasi tentang alokasi dana penyesuaian dan otonomi khusus lebih awal melalui koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- Meningkatkan peluang perolehan hibah dari pemerintah.

## 4.3. Belanja Daerah

### 4.3.1. Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.750.336.724.066,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2012 Belanja Daerah ditargetkan menjadi Rp 1.727.010.736.800,00 atau menurun sebesar Rp. 23.325.987.266,00 (1,33%). Jika diperbandingkan dengan rencana pendapatan, maka terjadi surplus belanja sebesar Rp. 13.323.000.000,00 atau meningkat sebesar 207,33 % dari tahun 2011. Pada tahun 2012 merupakan tahun perwujudan NTB Beriman dan Berdayasaing. Artinya pada tahun 2012 cita-cita RPJMD 2009-2013 harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan pada tahun 2011, masih ada 16 indikator yang belum dapat dilihat hasilnya karena indikator-indikator tersebut baru dapat dipertanggung jawabkan hasil capaiannya pada akhir tahun.

### 3.3.2. Kebijakan Belanja Diarahkan Pada :

- Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung sebesar 54,86% dan Belanja Langsung sekitar 45,14% dari total Belanja Daerah.
- Memperbesar proporsi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal terhadap Belanja Pegawai pada komponen Belanja Langsung.

kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

#### 4.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi NTB

##### 4.2.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Dari tahun ke tahun pendapatan daerah diharapkan terus meningkat khususnya pendanaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Esensi otonomi daerah adalah terciptanya fiscal yang makin mandiri dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Namun bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan dari Pemerintah. Hal ini terlihat didalam APBD dimana sekitar dua pertiga dari total pengeluaran Pemerintah Daerah dibiayai oleh bantuan

dan sumbangan dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat belum optimal.

Penerimaan dari sektor Pajak Daerah dalam kurun waktu 2008-2010 masih menjadi sector yang memberikan kontribusi terbesar dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yaitu rata-rata sebesar 74,73 % sedangkan kontribusi dari PAD itu sendiri terhadap total Pendapatan Daerah adalah sebesar 41,44 % sebagaimana terlihat dalam tabel 4.4. Selebihnya sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dana perimbangan baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Penyesuaian dan otonomi khusus. Serta selebihnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang syah.

Tabel 4.1  
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi NTB  
Tahun 2008-2011

Jenis Penerimaan	2008		2009		2010		2011	
	Jml Penerimaan	Kontri -busi thd PAD						
PAD	434.192.088.288,75		474.455.062.324,08		515.340.956.845,65		746.831.223.000,00	
Pajak Daerah	348.568.544.102,00	80,28	369.172.468.753,00	77,81	391.690.341.968,00	76,01	478.077.006.000,00	64,01
a. PKB	88.679.141.800,00	20,42	107.767.730.515,00	22,71	121.518.483.332,00	23,58	133.996.986.000,00	17,94
b. BBNKB	120.527.137.250,00	27,76	150.273.380.410,00	31,67	160.875.148.303,00	31,22	213.279.989.000,00	28,56
c. PBBKB	138.304.603.212,00	31,85	109.960.739.667,00	23,18	108.067.238.072,00	20,97	130.450.031.000,00	17,47
d. AP	1.057.661.840,00	0,24	1.170.618.161,00	0,25	1.229.472.261,00	0,24	350.000.000,00	0,05
Retribusi Daerah	41.604.947.471,09	9,58	50.047.842.702,10	10,55	54.900.839.090,63	10,65	67.556.592.471,00	9,05
Bagian Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain	17.161.166.400,00	3,95	25.192.762.479,00	5,31	40.937.454.515,00	7,94	135.906.385.000,00	18,20
Penerimaan	26.857.430.315,66	6,19	30.041.988.389,98	6,33	27.812.321.272,02	5,40	65.291.239.529,00	8,74

Sumber: TAPD Provinsi NTB Tahun 2011

##### 4.2.2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.740.333.736.800,00 mengalami kenaikan Rp.2.410.216.524,00 atau

0,14% dari tahun 2011 sebesar Rp. 1.737.923.520.276,00.

Upaya-upaya pencapaian target pendapatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

2011). Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah peranan investasi menjadi salah satu daya dorong untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,35 persen di tahun 2012 (Kajian BP2EB). Dilain sisi sektor pariwisata sebagai salah satu program unggulan daerah kedepan diharapkan akan menjadi salah satu sektor yang mempunyai daya dorong yang kuat terhadap laju pertumbuhan ekonomi didukung oleh sektor-sektor lain sebagai interkoneksi daya ungkit sektor pariwisata. Disamping pariwisata sebagai program unggulan daerah juga sub sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan melalui program PIJAR, sub sektor peternakan melalui program BSS diharapkan juga akan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi NTB melalui interkoneksi sektor perhubungan dan pertambangan serta pembangunan infra struktur lainnya.

#### **4.1.2. Inflasi**

Selama tahun 2005 sampai dengan 2011 terjadi fluktuasi laju inflasi di NTB yang relatif cukup besar. Selama periode tersebut, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 17,72% pemicunya adalah adanya kenaikan administered good (harga BBM). Pada tahun 2007 dan tahun 2008 laju inflasi meningkat masing – masing menjadi 8,76% dan 13,01% penyebab terjadinya inflasi tersebut bersumber baik dari kondisi eksternal maupun internal NTB. Adapun penyebab terjadinya inflasi tersebut antara lain terjadinya krisis financial global akhir tahun 2008, anomali cuaca yang menyebabkan harga pangan yang meningkat, serta harga BBM yang meningkat. Disamping faktor tersebut penyebab inflasi di NTB karena jalur distribusi dan struktur pasar yang belum baik. Solusi komprehensif sepanjang Tahun 2009 terhadap dampak krisis global yang mempengaruhi perekonomian Provinsi NTB ternyata menampakkan hasil positif. Hal ini ditunjukkan oleh

menurunnya laju inflasi sebagai salah satu indikatornya. Pada tahun 2010 laju inflasi Provinsi NTB meningkat lagi menjadi sebesar 10,08 % namun demikian dengan kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya khususnya berkaitan dengan pengendalian laju inflasi dari sisi sektor riil maka pada tahun 2011 laju inflasi menurun menjadi 6,55.

#### **4.1.3. Pendapatan Perkapita dan Paritas Daya Beli Masyarakat**

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat didasarkan pada kondisi moneternya. Adapun perkembangan PDRB Perkapita Provinsi NTB semakin meningkat yaitu dari Rp 4.986.631 pada tahun 2008 menjadi Rp 6.685.103 pada tahun 2010, demikian juga dengan daya beli masyarakat meningkat dari Rp 633.580 pada tahun 2008 menjadi Rp 647.130 pada tahun 2011. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa terdapatnya perbaikan aktivitas ekonomi yang akan mengikuti perkembangan harga yang selalu berfluktuatif. Kemampuan untuk membeli dari masyarakat diharapkan akan mampu menjadi penyeimbang bila terjadi inflasi, artinya jika terjadi gejala inflasi masyarakat tidak serta merta mengalami guncangan karena masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan meskipun terjadi kenaikan harga barang yang dikonsumsi.

#### **4.1.4. Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan data BPS tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 variabel pembentuk IPM selalu menunjukkan peningkatan kecuali variabel rata-rata lama sekolah yang menunjukkan angka konstan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 yaitu 6,7, baru tahun berikutnya meningkat menjadi 6,73 dan menjadi 6,77 pada tahun 2010. Namun demikian berdasarkan kajian Yusuf Hasbullah dkk (2011) NTB sulit mencapai target IPM-nya pada tahun 2011-2013 yaitu sebesar 66,02, 68,02 dan 70,00, hal ini disebabkan karena perubahan variabel yang telah ditetapkan perlu dilakukan program-program yang dapat meningkatkan

- serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan RPJMD dan MP3EI baik secara nasional maupun regional sesuai dengan judul penelitian.
2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terutama pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi NTB,Bappeda Provinsi NTB sehubungan dengan data-data dan informasi terkait dengan variabel-variabel penelitian di atas.
- 3.4. Jenis dan Sumber Data**
- Penelitian ini menggunakan data skunder yaitu data yang dikumpulkan langsung dari Biro sekretariat Daerah Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB sesuai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data skunder yang dimaksudkan terdiri dari : data variabel makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, IPM dan data APBD Provinsi NTB yang meliputi : data pendapatan, data pembelanjaan, data pembiayaan dan data alokasi masing-masing SKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2009-2012.
- 3.5. Model Analisis Data**
- Sebelum penentuan arah kebijakan keuangan terlebih dahulu dilakukan analisis sbb :
1. Alokasi Dasar (belanja rutin/Gaji PNS)
  2. Kebutuhan Fiskal terdiri atas :
  3. Celaht Fiskal
- Selanjutnya penentuan arah kebijakan keuangan daerah dianalisis dengan cara :
1. Pola penyaluran yang bersifat kompetitif melalui program pendanaan kompetisi (PPK)
  2. Membagi alokasi menjadi 3 (tiga) antara lain :
    - 2.1. Dana Pemerataan yaitu : dana yang dialokasikan sama untuk setiap kabupaten/kota.
    - 2.2. Dana proporsional yaitu : dana yang dihitung berdasarkan indeks kabupaten kota.
- 2.3.Dana penyeimbang yaitu: dana yang ditentukan berdasarkan variable kualitatif seperti: kabupaten/kota yang berbatasan dengan provinsi lain, kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan event-event tertentu(skalanasional/regional/internasional). Indeks kabupaten/kota meliputi : Indeks fiscal daerah, Indeks ruang fiscal, Indeks kemiskinan, dll.
- 2.4.Kriteria kegiatan yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan kabupaten/kota antara lain : (a)program peningkatan IPM, (b) penanggulangan kemiskinan dan (c) pengangguran

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Perekonomian Nusa Tenggara Barat.

Variabel makro ekonomi yang dipaparkan untuk menganalisis kondisi makro ekonomi NTB adalah PDRB, Inflasi, Pendapatan perkapita, kemampuan daya beli dan IPM.Adapun paparan mengenai variabel tersebut adalah sebagai berikut:

#### 4.1.1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB

Berdasarkan pada perkembangannya struktur perekonomian Provinsi NTB masih didominasi oleh sektor primer hal ini disebabkan karena kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB NTB sebesar 36,40% . Sektor ini memberikan kontribusi yang relatif besar karena di dalamnya terdapat perusahaan tambang emas PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), sedangkan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap pembentukan PDRB sebesar 19,89 persen. Sementara sektor industri belum begitu berperan terhadap pembentukan PDRB karena sumbangannya baru sekitar 5,00 persen.

Dilihat dari struktur penggunaan PDRB sekitar 40,79 persen digunakan untuk konsumsi masyarakat dan 21,09 persen digunakan untuk kegiatan investasi (NTB Dalam Angka

kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

### **2.2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sumber penerimaan daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang syah. Sedangkan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan. Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002, bahwa penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

#### **1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan yang meliputi :

#### **a. Disiplin Anggaran**

APBD harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

#### **b. Keadilan Anggaran**

Pendapatan Daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Menurut tingkat eksplanasinya jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:11).

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipilihnya Provinsi ini secara purposive sampling sebagai lokasi penelitian terkait dengan Masterplan Percepatan Program Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor V yang meliputi wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan dasar pertimbangan bahwa Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata dengan program prioritas sektor pertanian sebagai pendukung stok pangan nasional.

### **3.3.Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Data dan informasi yang berkaitan dengan analisis kemandirian dan desentralisasi keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara :

1. Studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal ilmiah

## 2.2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 memberikan definisi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan daerah dan belanja daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Menurut Jaya dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004: 6) Keuangan Daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menjelaskan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Bastian (2001:8) adanya hubungan yang erat antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah. Sehingga baik dalam penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah maupun pelaksanaannya, menceminkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang mencakup hal – hal sebagai berikut (1) Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; (2) Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan; (3) Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah termasuk prinsip – prinsip pembagian sumber – sumber keuangan yang adil; (4) Mampu memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah; (5) Dapat menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan,

partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel) dan pasti; dan (6) Semakin mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Devas et al dikutip dalam Munir, Djuanda, Tangkilisan (2004: 7) pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip : (1) tanggung jawab, (2) mampu memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan daya guna, dan (5) pengendalian. Melalui misi utama dan tujuan utama pengelolaan keuangan daerah di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, yang meliputi DPRD dan masyarakat. Selain itu efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus dilaksanakan. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002).

Selanjutnya Nizarwan (2004:70) mengatakan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah hendaknya harus memperhatikan berbagai hal seperti : (1) Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas; (2) Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan; (3) Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan

penelitian tersebut ditemukan khususnya wilayah NTB ada 3 (tiga) sektor unggulan yang menjadi program prioritas dalam rangka menjawab visi NTB menjadi masyarakat **Beriman dan Berdaya Saing** yaitu melalui program pembangunan Islamic centre, pengembangan sektor pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai baik yang menyangkut regulasi maupun kebijakan yang bertumpu pada akar budaya masyarakat NTB, pengembangan sektor pertanian guna mendukung pengadaan stok pangan secara nasional melalui program **Pijar (padi dan rumput laut)**, pengembangan sektor peternakan guna peningkatan ekspor daging secara nasional melalui program **Bumi Sejuta Sapi (BSS)** dan penciptaan iklim investasi melalui program sistem pelayanan satu atap serta penyiapan infra dan supra struktur pelayanan dasar.

3. Selanjutnya dalam penelitian Yusuf Hasbullah (2006) yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Mataram. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian tersebut meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Total Pendapatan Daerah (TPD), Bagi Hasil Pendapatan Bukan Pajak (BHPBP), APBD dan PDRB. Dari hasil kajiannya disimpulkan bahwa proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) sebesar 7,87 persen, proporsi PAD ditambah BHPBP terhadap TPD sebesar 20,68 persen, rasio PAD terhadap belanja aparatur sebesar 14,16 persen, rasio PAD ditambah BHPBP terhadap belanja aparatur sebesar 37,19 persen. Akan tetapi jika diamati perkembangannya dari tahun ke tahun nampak bahwa proporsi PAD ini semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin besar. Ketergantungan yang semakin besar ini antara lain disebabkan oleh kondisi umum yang terjadi di semua kabupaten/kota yang diakibatkan oleh perubahan struktur anggaran seperti : gaji guru SD yang masuk dalam APBD, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keadaan ini akan mengakibatkan bertambahnya total APBD yang sumber

penerimanya berasal dari dana sumbangan pemerintah pusat.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Nizarwan dalam Halim (2004 :70) dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah mengatakan Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004. Kesimpulannya adalah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam mengalokasikan belanja aparatur dan belanja pelayanan publik senantiasa berpegang pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas

Menurut Mardiasmo (2004) dalam bukunya yang berjudul Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah mengatakan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalamukuran finansial dan berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Selanjutnya menurut Yusuf Hasbullah (2006:4) Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu instrumen untuk mencermati kemampuan suatu daerah dalam aspek finansial untuk mengorganisir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna pencapaian visi dan misi pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara parsial dikatakan kinerja dapat diartikan sebagai alat ukur kemampuan suatu daerah dalam menggali unsur-unsur penerimaan baik penerimaan aparatur maupun penerimaan publik dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk selanjutnya dipergunakan sebagai belanja aparatur dan belanja publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

melakukan inventarisasi sumber-sumber obyek retribusi disertai dengan penyusunan piranti lunak dan pengelolaan asset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan, (2) pembangunan sarana dan fasilitas ekonomi skala mikro yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah. Sedangkan untuk peningkatan dana perimbangan dilakukan upaya menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial seperti divestasi saham PT NNT dan Cukai Tembakau. Sedangkan penerapan pelayanan prima dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan sumberdaya aparatur, mengembangkan sarana prasarana dan mengembangkan sistem manajemen pelayanan satu atap.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja pemerintah daerah tahun 2012 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Anggaran kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini diharapkan mengacu pada program yang telah ditetapkan pada RPJMD 2009 - 2013. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap programunggulan dan strategis daerah.

Belanja Daerah sebagai bentuk penggunaan biaya yang efisien dan efektif disusun untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah dibentuk (money follow function) yang merujuk pada pembiayaan bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pencapaian target-target NTB Bersaing yang memiliki 5 misi, 8 tujuan dan 33 sasaran pembangunan sebagai ultimate goal. Pengeluaran daerah sebagai salah satu komponen penting

pembiayaan daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang jatuh tempo dan pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah dan kepada pemerintah daerah lain.

### 1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2009-2013).

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin diamati dalam penelitian ini adalah untuk : Mengetahui Bagaimana arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2009-2013).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hasbulah, M.Irwan, Taufiq Chaidir, Ida Ayu Putri Suprapti (2011) yang berjudul : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2009-2013) Adapun analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi sebanyak 53 indikator kinerja dari 62 indikator kinerja RPJMD. Hasil penelitian tersebut ditemukan ada 11 indikator yang masih cukup sulit untuk dicapai sampai dengan tahun 2013, sehingga kebijakan yang harus dilakukan oleh masing-masing SKPD yaitu agar melakukan program-program yang dapat mendorong tercapainya 11 indikator yang menjadi temuan penelitian.
2. Dalam penelitian selanjutnya oleh Yusuf Hasbulah, M.Irwan, Taufiq Chaidir, Ida Ayu Putri Suprapti (2011) yang berjudul : Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (RAD-MP3EI) Wilayah Koridor V yang meliputi wilayah Bali-NTB dan NTT. Adapun analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menyangkut Regulasi dan Kebijakan, Konektivitas, Iptek dan SDM. Hasil

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

PDRB Provinsi NTB tahun 2011 dan 2012 secara absolut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstant. Namun perkembangan tersebut jika dilihat dari sisi relatif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi selama periode yang sama tidak mengalami perubahan (konstant) sebesar 6,25 persen (Bappeda NTB, 2011, PDRB NTB, 2010). Optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut tetap kuat namun yang menjadi fokus perhatian baik dari tataran kebijakan, implementasi terutama penganggaran yakni adanya berbagai faktor yang dianggap mempengaruhi kondisi perekonomian NTB selain kondisi perekonomian global dan nasional, yaitu masih berfluktuatifnya nilai tambah yang diperoleh dari beberapa sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian NTB di antaranya sektor pertanian.

Oleh karena itu sektor-sektor tersebut terus didorong sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program-program pengembangan yang berskala prioritas.

Indikator ekonomi NTB selanjutnya adalah perubahan tingkat harga terhadap barang dan jasa (inflasi). Kestabilan harga merupakan suatu langkah yang terus dipertahankan dan diperhatikan oleh pemerintah, mengingat sedikit saja gejolak variabel ekonomi makro lain berubah maka pasti akan berpengaruh terhadap inflasi atau sebaliknya. Kondisi inflasi 1 digit ini sesuai dengan target capaian indikator kinerja pada tahun 2012 yang mempertahankan laju inflasi sebesar 1 digit, sehingga dengan inflasi yang demikian akan mampu merangsang pelaku ekonomi khususnya sektor swasta untuk mau melakukan aktivitas ekonomi yang lebih bergairah dibandingkan dengan periode – periode sebelumnya.

Selain dari kerangka pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan harga hal yang cukup esensi untuk revitalisasi kinerja ekonomi daerah adalah pendapatan perkapita, indikator ini merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan riel yang diperoleh daerah NTB dalam menghasilkan

barang dan jasa. PDRB perkapita merupakan besaran yang diterima oleh masyarakat, indikator ini masih dianggap relevan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. PDRB perkapita NTB tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp

6.168.361 dan Rp 9.393.616 (RPJMD NTB .2009-2013).

Indikator lain terkait dengan besaran-besaran makro ekonomi adalah dicerminkan oleh paritas daya beli masyarakat NTB yakni kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya didasarkan pada kemampuan untuk membayar suatu barang dan jasa yang dibutuhkan. Sesuai dengan target RPJM tahun 2012, bahwa paritas daya beli masyarakat adalah sebesar Rp. 668.000. Angka tersebut kiranya terus dapat dipacu meningkat, baik melalui akselerasi program pemerintah dan lembaga keuangan (program KUR), penguatan UMKM, maupun program-program terintegrasi (antar sektoral dan atau antar kawasan) yakni program MP3EI.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan pendapatan daerah secara optimal sesuai potensi daerah. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2013 masih diarahkan untuk: (1) meningkatkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, (2) penerapan pelayanan prima pada unit Pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, dan (3) penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah. Upaya dibidang perpajakan dengan (1) menyempurnakan peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu, (2) Peningkatan kemampuan personil serta perangkat kerja lainnya (3) peningkatan pelayanan, penambahan pengadaan sarana pendukung dan memperluas Mobilitas untuk Samsat Keliling serta peningkatan pelayanan Drive Thru dalam mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak / masyarakat. Sedangkan dibidang retribusi daerah dengan (1)

## Analisis Arah Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kaitannya Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013

**Siti Fatimah.,Ida Ayu Putri Suprapti., Busaini., Masrun**

Universitas Mataram

**ARTICLE INFO**

Received : 15 Januari 2015; Accepted: 18 Mei 2015; Published: Juni 2015

**Keywords :**  
Budget Allocation System,  
,RPJMD, MP3EI

**ABSTRACT :** The aims of this research is not only to know the economic and financial policies direction but also to know budget allocation system of Regency/City with the direction of economic policy and financial of West Nusa Tenggara Province Year 2013 related to the Region Medium Term Development Plan (RPJMD Year 2009 -2013).The kind of this research is descriptive and it was conducted in West Nusa Tenggara Province, selected by purposive sampling, because it is associated with the Indonesia Masterplan Economic Development Acceleration Program (MP3EI) Corridor V, which covers an area of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara Provinces where West Nusa Tenggara (NTB) has been defined as a region tourist destination with the agriculture sector priority programs as supporting national food stocks. Based on the research, it found that the direction of economic policy of West Nusa Tenggara Province partly complies with the target of the Medium Term Development Plan (RPJMD Years 2009-2013). Moreover, according to the Budgetary Receipts and Expenditure of NTB Province about two-thirds of total local government expenditure financed by the aid and assistance of the central government, while regional receipts contribution to the West to the West Nusa Tenggara provincial budget has not been optimal.While the system of budget allocation Regency/City related to economic policy and financial of West Nusa Tenggara province is still a block grant from revenue sharing to be done properly and have been prepared by each SKPD to strengthen the fiscal capacity of the Regency/city.

**Kata kunci :**  
Sistem Alokasi Anggaran,  
RPJMD, MP3EI

**ABSTRAK :** Tujuan dari penelitian ini adalah tidak hanya untuk mengetahui arah kebijakan ekonomi dan keuangan tetapi juga untuk mengetahui sistem alokasi anggaran dari Kabupaten / Kota dengan mengacu pada arah kebijakan ekonomi dan keuangan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 yang berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Tahun 2009 -2013). Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dipilih secara purposive sampling, karena berhubungan dengan Indonesia Masterplan Pembangunan Ekonomi Program Percepatan (MP3EI) Koridor V, yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana Nusa Tenggara Barat (NTB) telah ditetapkan sebagai wilayah dengan tujuan wisata dari program prioritas sektor pertanian sebagai pendukung stok pangan nasional. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Tahun 2009-2013). Selain itu, menurut Penerimaan Anggaran dan Belanja Provinsi NTB sekitar dua-pertiga dari total belanja pemerintah daerah dibiayai oleh bantuan dari pemerintah pusat, sementara penerimaan daerah memiliki kontribusi meskipun anggaran provinsi Nusa Tenggara Barat belum optimal. Sementara sistem alokasi anggaran Kabupaten/kota terkait dengan kebijakan ekonomi dan keuangan dari provinsi Nusa Tenggara Barat masih block grant dari hasil yang harus dilakukan dengan benar dan disusun oleh masing-masing SKPD untuk memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten/kota .

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.  
Email : [sitifatimah@yahoo.com](mailto:sitifatimah@yahoo.com)

JEL Classification : H2

## DAFTAR ISI

*Hailuddin*

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah NTB Bidang Perekonomian 2009-2013 ..... 1-14

*Siti Fatimah, dkk*

Analisis Arah Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kaitannya Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013 ..... 15-28

*Iwan Kusmayadi, Baiq Nurul Suryawati, Laila Wardani*

The Equity Market : The Comparison Between Indonesia, Australia, And United States Of America ..... 29-37

*Mala Vinuzia, Prayitno Basuki, Abdul Manan*

Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat ..... 38-51

*Suprianto*

Peran Kelembagaan dalam Pembangunan Ekosomi Pedesaan (Studi Kasus di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat) ..... 52-62

*Ade Paranata, Muaidy Yasin*

Strategi Kerjasama Sektoral Kota Mataram Dengan Daerah Sekitar : Pendekatan Game Theory ..... 63-82

**DISTRIBUSI**  
**JURNAL ILMIAH EKONOMI**  
**ISSN 0853 – 9571, ISSN 2477 – 1767**  
**EDISI KE XXXV TAHUN KE XXIV JUNI 2015 VOL. 1**

Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Dr. Muaidy Yasin, MS.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram)

Editor  
Prof Dr. H. Mansur Afifi  
Dr. Surati, SE., M. Si.  
Dr. Taufiq Chadir, M. Si.  
Sulhaini, SE, M.Sc., Ph.D  
Dr. Wahyunadi  
Dr. M. Ali Fikri, MSA

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)  
Prof Sutjipto Ngumar, Ph.D, Ak. (STIESA Surabaya)  
Prof M. Safi'i Idrus, SE, M.Sc., Ph.D (UNIBRAW Malang)  
Prof Dr. Umar Nimran (UNIBRAW Malang)  
Prof Dr. Wan Usman (UT Jakarta)  
Prof Dr. Ahmad Rilam (UNPAD Bandung)  
Dr. Ahmad Rifa'i (UNRAM Mataram)

Redaktur Pelaksana  
Irwan Suriadi, SE., M.Si.  
Ade Paranata, SE, M.Si.

Alamat Penerbit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram  
Jalan Majapahit No. 62 Mataram  
Telp (0370) 631935, 639710  
Fax. (03 70) 631802  
e-mail : distribusifeunram@yahoo.co.id

Terbit 2 kali setahun  
(Bulan Juni dan Desember)

**Edisi ke XXXV  
TAHUN KE XXIV  
JUNI 2015  
Volume 1**

**ISSN 0853-9571 (print)  
ISSN 2477-1767 (online)**

# **DISTRIBUSI**

**JURNAL ILMIAH EKONOMI**

Hailuddin

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah NTB  
Bidang Perekonomian 2009-2013

Siti Fatimah,  
Ida Ayu Putri S.,  
Busaini, Masrun

Analisis Arah Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi  
Nusa Tenggara Barat Kaitannya Dengan Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013

Iwan Kusmayadi,  
Baiq Nurul Suryawati,  
Laila Wardani

The Equity Market : The Comparison Between Indonesia,  
Australia, And United States Of America

Mala Vinuzia,  
Prayitno Basuki,  
Abdul Manan

Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi  
dan Ketimpangan Antar Daerah Pembangunan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Suprianto

Peran Kelembagaan Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan  
(Studi Kasus di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri  
Kab. Lombok Barat)

Ade Paranata,  
Muaidy Yasin

Strategi Kerjasama Sektoral Kota Mataram dengan Daerah  
Sekitar : Pendekatan Game Theory